

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Pada tanggal 7 Agustus 1877 di bangsal Pagelaran Keraton Yogyakarta, hari Selasa, Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro yang bergelar Sudibyo Rojoputro Narendro Mataram,<sup>1</sup> mengucapkan pernyataan resmi pertama dalam sebuah pertemuan umum. Pertemuan ini dihadiri oleh semua kerabatnya dan para pejabat tinggi Kesultanan Yogyakarta. Hadir pula Residen Yogyakarta, Adolph Joan Bernard Wattendorf yang dalam hal ini bertindak mewakili Gubernur Jenderal Loudon, bersama para pejabat kolonial Belanda yang ditempatkan di Karesidenan Yogyakarta dan Karesidenan Surakarta (*Vorstenlanden*). Dalam pernyataan ini, pangeran itu berjanji untuk memperhatikan tiga hal :

*Pertama*, memperbaiki kondisi keamanan dan penegakan hukum dalam bidang pidana atau kriminalitas, salah satunya dengan menerima pengangkatan asisten residen di wilayahnya.

*Kedua*, merawat semua jalan dan jembatan sebagai infrastruktur yang penting dalam memperlancar komunikasi dan transportasi di wilayah kekuasaannya dengan daerah lain.

*Ketiga*, meminta kerja wajib dari penduduk tanah-tanah yang disewakan kepada perusahaan perkebunan melalui perantaraan para penyewa tanah. Jika ada persoalan yang muncul dengan penyewa tanah, ia akan menyerahkannya kepada keputusan pemerintah kolonial.<sup>2</sup>

Setelah mengucapkan janji-janji di atas dan disaksikan oleh Residen Wattendorf, atas nama pemerintah Hindia Belanda, Wattendorf mengukuhkan kedudukan Pangeran Adipati Anom Hamangkunagoro menjadi Sultan Hamengku

---

<sup>1</sup>Dikukuhkan sebagai Pangeran Adipati tanggal 17 April 1872. Ia terlahir pada tanggal 4 Pebruari 1839 sebagai putra sulung dari Sultan Hamengku Buwono VI dari selir. Lihat G.P. Rouffaer, "De Vorstenlanden" dalam John F. Snelleman, *Encyclopaedie van Nederlandsch Indië, vierde deel* ('s Gravenhage, 1935, Martinus Nijhoff), halaman 600.

<sup>2</sup>P.W. Filet, *Verhouding der Vorsten op Java tot de Nederlandsch Indische Regeering* (;s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895), halaman 308.

Buwono VII<sup>3</sup> dengan gelar Senopati Ingalogo, Ngabdurrachman, Sayidin Panotogomo Kalifatullah kaping Pitu, dengan saksi pamannya patih Yogyakarta R.A. Danurejo VI dan adiknya Pangeran Mangkubumi.

Dilihat dari isi janji yang diucapkan tersebut, setidaknya tersirat suatu kondisi yang mana wilayah Yogyakarta sebelum pelantikannya berada dalam kondisi yang kacau. Ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, adalah dominasi persewaan tanah oleh para penyewa tanah atas kepemilikan lahan di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Dan yang kedua, kerawanan situasi keamanan di daerah pedalaman sebagai akibat peningkatan tindak kejahatan. Sejak Perang Diponegoro berakhir, menyusul tanah-tanah milik Kesultanan Yogyakarta yang makin menyempit, akibat penghapusan wilayah *Monconegoro Wetan* dan *Monconegoro Kulon* pada tanggal 3 November 1830, kekurangan penghasilan dan kemiskinan melanda para bangsawan Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh penghapusan atau pengurangan tanah-tanah *apanage* mereka yang diambil-alih oleh pemerintah Hindia Belanda.<sup>4</sup>

Kondisi tersebut, bersama juga dengan situasi yang belum pulih sebagai akibat Perang Diponegoro, banyak penduduk yang meninggalkan tempat asalnya dan pindah ke daerah yang lebih aman, mengakibatkan kemerosotan produksi agraria yang menjadi sumber pemasukan utama bagi kas keraton. Hal ini mendorong para penguasa pribumi, baik Sultan sendiri maupun para bangsawan khususnya yang menguasai tanah-tanah *apanage*, untuk menerima tawaran dari para pejabat Belanda di Yogyakarta untuk menyewakan tanah-tanahnya kepada para pemilik modal asing. Melalui perantaraan residen, sejak tahun 1831 para pengusaha Eropa swasta mengajukan permohonan dan menerima hak sewa (*erfpacht*) tanah-tanah di Kesultanan Yogyakarta. Pada mulanya mereka menyewa tanah-tanah *apanage* milik bangsawan Yogyakarta, tetapi beberapa tahun kemudian sasaran persewaan mereka meluas pada tanah-tanah rakyat dan bahkan tanah Sultan sendiri (*bumi norowito*).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Nama kecilnya adalah G.R.M. Murtejo, dilahirkan dari GKR. Sultan. Setelah mendapatkan gelar pangeran ia disebut Pangeran Hangabehi, karena merupakan putra sulung raja. Dengan demikian ia sering disebut sebagai Sinuhun Behi.

<sup>4</sup>Vincent J. Houben, *Kraton and Kompeni* (Leiden, 1994, KITLV Press), halaman 61-62.

<sup>5</sup>ANRI, *Algemeen Verslag van het Residentie Djocjakarta over het jaar 1835*, bundel Yogya nomor 275.

Ketika investasi perkebunan swasta asing (*onderneming*) masuk di wilayah Yogyakarta, suasana kehidupan sosial di Kesultanan ini mengalami perubahan. Perubahan ini terutama bertumpu pada hubungan kerja baru yang diterapkan di tanah-tanah sewaan oleh perusahaan perkebunan terutama gula. Di wilayah Kesultanan Yogyakarta segera berdiri sejumlah pabrik gula yang membentuk suatu kompleks lingkungan sendiri di antara lingkungan pemukiman penduduk pedesaan Jawa. Pabrik gula ini menyewa tanah-tanah apanage yang kemudian diperluas dengan tanah-tanah penduduk, baik yang bersifat komunal maupun individu. Hubungan kerja baru dibentuk dengan menggunakan sistem kerja upah. Dalam sistem ini penduduk desa yang disewa tanahnya, atau penduduk tanah apanage yang kehilangan lahan tanamnya, diperintahkan untuk bekerja sebagai petani tebu atau menjadi buruh pabrik. Mereka yang menjadi petani *sikep*, yaitu yang memiliki tanah sendiri dan disewa oleh pabrik gula, bisa bekerja sebagai buruh pabrik, tetapi juga bisa bekerja di luar rotasi produksi gula, misalnya, menyewakan ternaknya sebagai tenaga angkut tebu dan gula.<sup>6</sup>

Setelah berlangsung sekitar dua puluh tahun, dampak dari perubahan ini mulai terasa. Di bidang ekologi, tanaman tebu telah menghabiskan humus tanah, sehingga setelah masa sewa tanah berakhir, tanah-tanah yang kembali kepada petani atau bangsawan tidak lagi menjadi lahan produktif. Begitu juga dengan sarana pengairan, pengusaha perkebunan mendominasi kepemilikan air untuk menggenangi kebun tebu yang mengakibatkan tanah-tanah padi milik rakyat kekeringan. Mereka yang bekerja sebagai petani tebu atau buruh pabrik juga mengalami kemerosotan penghasilan, karena upah (*loon*) yang mereka terima tidak bisa digunakan untuk hidup setelah dipotong pajak. Terlebih lagi setelah kontrak sewa selesai, sehingga mereka mengalami pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian pihak pemilik modal asing lebih unggul posisinya, sementara masyarakat pribumi berada pada posisi yang lemah dan dirugikan.<sup>7</sup>

Kondisi demikian telah menimbulkan keresahan pada masyarakat, dan hal ini setidaknya menimbulkan tiga kelompok warga yang dikecewakan. Pertama,

---

<sup>6</sup>Bundel *Binnenlandsch Bestuur No. 2727, Nota Omtrent agrarische zaken in Vorstenlanden door controleur Jonquiere.*

<sup>7</sup>Suhartono, "The Javanese concept of optimism in uncertainty: village life in the Principalities", dalam J. Thomas Lindblad, *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia* (Leiden, 1993, Programme of Indonesian Studies), halaman 184.

mereka yang tersingkir dari tanah-tanah yang disewa oleh pengusaha perkebunan (*onderneming*), yaitu mereka yang tinggal menumpang kepada pemilik tanah sebelumnya (*sikep*). Mereka tidak lagi bisa menggarap tanah dan kemudian pergi mengembara untuk mencari penghidupan lain. Kelompok ini menjadi rentan terhadap provokasi untuk melakukan tindak kejahatan.<sup>8</sup>

Kelompok kedua adalah mereka yang merasa kecewa terhadap kondisi yang ada, seperti para pemilik tanah yang menemukan bahwa sawah mereka tidak lagi subur, atau pemilik ternak yang merasa dieksploitasi oleh pihak perkebunan. Dengan pengaruh dan posisi mereka kemudian sering memimpin suatu gerakan perlawanan terhadap dominasi perkebunan dalam kehidupan ekonomi desa. Hal semacam ini hampir terjadi di wilayah pedesaan di Yogyakarta – maupun di Surakarta. Misalnya sering terjadi sejumlah peristiwa pembakaran kebun tebu, penyerangan terhadap pegawai perkebunan, pencegahan terhadap pengiriman tebu ke pabrik dan sebagainya.<sup>9</sup>

Kelompok ketiga adalah mereka yang memang berprofesi sebagai gerombolan perampok atau *kecu*. Di wilayah Kesultanan Yogyakarta ada sejumlah gerombolan perampok ini yang terkenal seperti Gobang Kinosek, Dadhung Sinedel, dan sebagainya<sup>10</sup>. Daerah operasi mereka berada di pedesaan, tetapi ada kalanya mereka bergerak di pinggiran kota. Sasaran mereka adalah orang-orang kaya dan elit desa seperti lurah, bekel, demang, dan sebagainya. Bahkan di pinggiran kota mereka berani melakukan perampokan di rumah bangsawan berpangkat asisten wedana.

Situasi keresahan sosial dan kerawanan keamanan ini menjadi perhatian dari Sultan Hamengku Buwono VII. Untuk itu dalam pemerintahannya ia bertekad untuk melakukan perombakan atas aparat hukum dan keamanan dengan tujuan mengatasi hal tersebut. Hal ini diwujudkan dalam tindakannya mengangkat para bupati *gunung*, atau bupati polisi yang ditempatkan di masing-

---

<sup>8</sup>Donald S. Zagoria, “Asian Tenancy System and Communist Mobilization”, dalam John Wilson Lewis, *Peasant Rebellion & Communist Revolution in Asia* (California, 1974, Stanford Univ. Press), halaman 40-41. Mereka sering disebut sebagai kelompok petani tak bertanah (*landless peasant group*).

<sup>9</sup>Suhartono, *Apanage dan Bekel : Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920* (Yogya, 1991, Tiara Wacana), halaman 159.

<sup>10</sup>Suhartono, *Bandit-bandit Pedesaan : Studi Historis 1850 -1942* (Yogya, 2010, Graha Ilmu), halaman 122-123.

masing kabupaten. Para pejabat ini kemudian bertugas untuk menjaga keamanan dan menekan tindak kejahatan. Mereka berada di bawah perintah Patih Danureja VI yang bertanggungjawab kepada raja.

Bersama dengan pengangkatan para bupati *gunung* ini, pemerintah kolonial juga memandang perlu untuk memperluas intervensi pemerintah. Residen Wattendorf beberapa kali menerima keluhan dari para pengusaha perkebunan tentang peningkatan tindak kejahatan di lahan perkebunan. Meskipun Sultan menjanjikan akan membenahi kondisi keamanan dan mengangkat para kepala keamanan di masing-masing kabupaten, Wattendorf kurang yakin dan mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Loudon untuk mengangkat asisten residen. Hal ini disetujui dan dengan demikian pada tahun 1892, empat orang asisten residen ditempatkan di wilayah Karesidenan Yogyakarta untuk membantu residen. Kendati pada mulanya fungsi pejabat tersebut adalah seorang asisten residen keamanan, namun pada tahun 1903, pejabat tersebut disertai untuk memegang pemerintahan.<sup>11</sup>

Sementara itu, keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan Eropa ini sendiri juga telah memberi peluang bagi pengaruh asing yang semakin dominan di Kesultanan Yogyakarta. Sejak tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda semakin intensif melakukan intervensi dalam persoalan politik dan ekonomi kerajaan Jawa ini. Tiga orang raja (Sultan HB IV, Sultan HB V, dan Sultan HB VI) yang berkuasa hingga tahun 1877 telah disodori kontrak-kontrak politik yang semakin memberi kesempatan kepada pemerintah Belanda untuk memantapkan pengaruh mereka. Kontrak-kontrak politik itu, di antaranya, raja-raja Yogyakarta wajib untuk meminta petunjuk dari pejabat kolonial setempat (residen) sebelum membuat keputusan penting yang berkaitan dengan kebijakan politik dan ekonomi raja, seperti halnya yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono VII.

Dengan kondisi demikian, intervensi politik dan dominasi ekonomi yang bersifat eksploitatif, periode pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII (1877 – 1921) bisa diperkirakan merupakan masa pelaksanaan kebijakan kolonial Belanda di Kesultanan Yogyakarta yang masih diakui sebagai bentuk pemerintahan

---

<sup>11</sup>C.Ch. van den Haspel, *Overzicht in Overleg: Hervormingen van Justitie, Grondgebruik en Bestuur in de Vorstenlanden op Java, 1880-1930* (Dordrecht, 1985, Foris Publications), halaman 103.

swapraja (*zelfbestuur*). Sultan sendiri bukannya tidak menyadari hal itu. Ketika penetrasi kebudayaan Eropa juga mulai merambah kehidupan sosial masyarakat Jawa di bawah kekuasaannya, Sultan HB VII mengambil inisiatif untuk membangkitkan kembali kehidupan budaya Jawa sebagai simbol-simbol identitas diri. Di bawah pemerintahannya, langkah-langkah diambil bukan hanya untuk mendorong penampilan fisik unsur-unsur budaya tetapi juga peraturan dikeluarkan untuk menata penerapannya. Misalnya, Sultan HB VII memerintahkan peraturan penggunaan busana sesuai dengan stratifikasi sosial yang ada, baik di kalangan birokrasi kraton maupun di luar kehidupan kraton. Produk simbol-simbol budaya juga ditingkatkan dan dikembangkan dengan maksud, bahwa di bawah kekuasaannya identitas budaya Jawa harus kembali digali dari keterpurukannya yang selama ini telah terabaikan.

Langkah-langkah Sultan HB VII tersebut tidak terlepas juga dari perhatian pemerintah kolonial. Setidaknya ada dua peristiwa besar terjadi pada masa pemerintahannya di bidang ekonomi dan politik yang saling berkaitan. Pada bidang ekonomi, upaya pemerintah kolonial berhasil dilakukan atas inisiatif Kepala Kantor Urusan Agraria, Jonquiere, untuk melakukan reorganisasi agraria di *Vorstenlanden*. Di mata para pejabat Belanda, sistem pengaturan dan kepemilikan tanah yang saat itu berlaku di kerajaan-kerajaan Jawa dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan perekonomian pasar global yang menjadi sumber pendapatan bagi negara. Sistem lama yang ada dianggap sebagai penghambat bagi roda kehidupan perekonomian dan dituduh sebagai sumber eksploitasi atas kawula raja oleh para penguasa feodal. Pemerintah Belanda yakin bahwa dengan penerapan pembaharuan seperti yang diberlakukan di tanah-tanah pemerintah sejak tahun 1870, kemakmuran akan dirasakan oleh masyarakat Jawa dan produktivitas tanah akan lebih ditingkatkan. Gubernur Jenderal Idenburg menyetujui hal itu dan menekan raja-raja Jawa agar sejak tahun 1912 menghentikan persewaan tanah kepada perusahaan swasta untuk sementara dan membentuk komisi yang akan melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan ini kemudian digunakan sebagai dasar bagi pembaharuan agraria yang kemudian dikenal sebagai reorganisasi agraria di *Vorstenlanden*.

Bidang kedua yang diintervensi oleh pemerintah kolonial adalah bidang politik. Dalam hal ini pemerintah kolonial menyadari bahwa Sultan HB VII dianggap kurang bekerja sama untuk mewujudkan kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal reorganisasi agraria ini.<sup>12</sup> Sejak awal abad XX, pemerintah sudah memikirkan pengganti raja tersebut, dan melalui saran Patih Danurejo VI hendaknya pemerintah kolonial mempertimbangkan calon yang diajukannya. Ketika Sultan HB VII memilih putra mahkota Gusti Raden Mas (selanjutnya disingkat, GRM) Akhadiat, putra sulung dari permaisuri, sebagai Pangeran Hamengkunegoro I, berita itu segera terdengar di Batavia. Melalui residen, Akhadiat ditetapkan sebagai putra mahkota. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena GRM Akhadiat kemudian meninggal dunia. Setelah itu Sultan HB VII mengangkat adik Akhadiat yaitu GRM Juminah. Namun Pemerintah Hindia Belanda lama-kelamaan kurang berkenan dengan penunjukan Juminah. Dengan berbagai alasan, pemerintah kolonial meminta Sultan, agar mengganti Juminah. Akhirnya, penetapan putra mahkota kepada Juminah dibatalkan. Agar tidak dihukum buang, GRM Juminah dinyatakan menderita sakit kejiwaan.

Karena kekosongan ini, Sultan HB VII kemudian mengangkat putra yang lain. Calon ketiga yang menjadi pilihannya adalah GRM Putro, yang merupakan adik kandung dari Juminah, yang kemudian dikukuhkan menjadi putra mahkota pada tahun 1895. Namun, secara tiba-tiba, pada tahun 1913, GRM Putro meninggal dunia. Dengan demikian Sultan HB VII adalah satu-satunya raja Yogya yang mengangkat tiga putra mahkota, tetapi tidak seorangpun yang berhasil menjadi penggantinya. Kekosongan ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan para kerabat raja. Namun dua tahun kemudian sejak kematian Putro, Sultan HB VII menetapkan GRM Soedjadi, adik kandung GRM Putro menjadi putra mahkota.

Pada saat yang bersamaan kehidupan politik di kraton Yogyakarta mulai dianggap mengawatirkan bagi pemerintah di Batavia. Aliran-aliran kebatinan

---

<sup>12</sup>C.Ch. van den Haspel, *ibid.*, halaman 135. Pada tahun 1889 Sultan HB VII menolak tuntutan pemerintah Belanda untuk melimpahkan wewenang hukum dan aparat keamanan dari kraton kepada pemerintah, seperti yang terjadi di Solo. Pemerintah Belanda saat itu menganggap bahwa sistem peradilan yang ada di Kesultanan Yogyakarta tidak lagi sesuai untuk dijadikan dasar hukum, khususnya untuk mengadili kawula pemerintah. Lihat P. W. Filet, *De Verhouding der vorsten op Java tot de Ned. Indische Regeering* ('s Gravenhage, 1895, Martinus Nijhoff), halaman 230-231

banyak bermunculan dan dianggap bisa berpotensi pada perlawanan terhadap Belanda, seperti aliran Ki Ageng Suryo Mataram. Semua ini dibiarkan dan justru didukung oleh Sultan HB VII.<sup>13</sup> Di luar keraton, organisasi pergerakan mulai berkembang seperti Sarekat Islam, Indische Partij, dan sebagainya. Banyak abdi dalem keraton yang menjadi anggotanya, sementara Sultan HB VII tidak melarang mereka. Semua ini menjadi kekhawatiran pemerintah Belanda dan menambah niatnya untuk segera mengganti Sultan HB VII.

Puncak dari situasi ini adalah sikap pribadi raja yang dianggap melanggar kontrak politik dengan Belanda. Sultan HB VII lebih banyak berada di Pesanggrahan Ambarukmo - semacam istana peristirahatan yang dibangun oleh Sultan HB V. Di tempat ini, Sultan dengan bebas menerima tamu-tamu dari Kesunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Hal itu menimbulkan kecurigaan dari para pejabat Belanda di Yogyakarta tentang potensi konspirasi politik di antara raja-raja Jawa.

Situasi ini tidak lagi bisa dibiarkan menurut pandangan pemerintah Belanda. Residen P.W. Jonquière melaporkan kepada Gubernur Jenderal Fock agar pergantian tahta di Kesultanan Yogyakarta dipercepat dengan memanggil pulang GRM Soedjadi atau Pangeran Puruboyo yang masih belajar di Belanda. Fock yang bersepakat dengan Menteri Koloni S. de Graaf mengusahakan Soedjadi kembali pada bulan Januari 1921. Fock lewat Jonquière mengatakan kepada Sultan HB VII, bahwa putra mahkota bersedia pulang, asalkan setiba di Kesultanan Yogyakarta segera didudukkan di tahta Kesultanan Yogyakarta. Atas desakan Jonquière dan didukung oleh Patih Danurejo VII, Sultan HB VII bersedia turun tahta dan memutuskan untuk meninggalkan kraton. Pada akhir Januari 1921, secara resmi Sultan HB VII memasuki Pesanggrahan Ambarukmo dan tinggal di sana hingga wafat.<sup>14</sup> Dengan demikian Sultan HB VII

---

<sup>13</sup>Organisasi atau aliran demikian banyak muncul dalam bentuk organisasi kesenian seperti seni tari, karawitan, macapatan dan sebagainya. Ini juga berkaitan dengan meningkatnya perhatian Sultan HB VII pada kehidupan seni tradisional yang mengalami pertumbuhan pesat di bawah pemerintahannya. Lihat Soedarsono, *Wayang Wong: The state ritual dance drama in the court of Yogyakarta* (Yogya, 1984, Gadjah Mada University Press), halaman 28.

<sup>14</sup>Ch. Van den Haspel, *op.cit.*, halaman 224. Menurut laporan Jonquière kepada Fock, Sultan HB VII sudah tidak lagi bersemangat untuk memerintah sehingga lebih suka untuk mengundurkan diri. Tampaknya alasan ini tidak lazim diterapkan pada raja-raja Jawa. Hal lain yang menunjukkan kejanggalan dari alasan tersebut adalah tahta Kesultanan Yogyakarta mengalami kekosongan ketika Sultan HB VII turun tahta dan Sultan HB VIII belum tiba. Raja baru ini naik tahta bulan Pebruari 1921, dengan demikian ada satu bulan kekosongan



adalah Sultan Yogyakarta yang kedua, setelah Sultan HB II (1792 – 1828),<sup>15</sup> yang turun tahta ketika masih memerintah dan tinggal di kota Yogyakarta tanpa kembali ke tahta. Setidaknya selama beberapa bulan, Kesultanan Yogyakarta memiliki dua orang Sultan yang mengulang kembali sejarahnya seratus tahun sebelumnya – yang terjadi pada Sultan HB II.

## 1.2. Permasalahan

Pokok masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah daya tahan dan kebijakan Sultan Hamengku Buwono VII dalam menghadapi berbagai gejolak pada masa pergantian abad XIX ke abad XX. Ketika dunia sedang berubah drastis, termasuk di Kerajaan Belanda, maka perubahan itu juga mempengaruhi negeri-negeri tanah jajahan, termasuk di Kesultanan Yogyakarta. Sultan HB VII merupakan raja di Yogyakarta yang memerintah paling lama, yaitu selama 40 tahun. Selama masa pemerintahannya, dia menghadapi dua ancaman yaitu dari luar dan dari dalam kraton. Ancaman dari luar berasal dari tekanan pemerintah Hindia Belanda yang terus membatasi ruang geraknya di Kesultanan Yogyakarta, serta mengambil alih hak-hak raja dalam berbagai aspek kehidupan sosial-ekonomi. Ancaman dari dalam muncul akibat polarisasi yang terjadi di kalangan keluarga dengan kepentingan masing-masing kelompok, terutama terkait dengan persoalan pewaris tahta. Puncak permasalahan yang dihadapi Sultan HB VII adalah soal pelaksanaan reorganisasi dalam bidang administrasi yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial, dan beberapa kali pergantian status putra mahkota, hingga akhirnya Sultan HB VII sendiri yang harus turun tahta.

Bertolak dari permasalahan di atas, sejumlah pertanyaan penelitian akan diajukan:

1. Apa strategi yang digunakan oleh Sultan HB VII ketika ia harus menghadapi tekanan Belanda terhadap kekuasaannya?
2. Apa makna yang terletak di balik pergantian status putra mahkota yang berakhir dengan kematian atau pergantian para pewaris tahta?

---

pemerintahan. Jika Sultan HB VII memang berniat turun tahta, pasti tidak akan terjadi kekosongan kekuasaan.

<sup>15</sup> Marihandono, Djoko dan Harto Juwono, 2008, “*Sultan Hamengku Buwono II, Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa*,” Banjar Aji Production : Yogyakarta

3. Apa dasar yang melandasi keputusan Sultan HB VII untuk mengangkat Puruboyo menjadi putra mahkota terakhir, daripada memilih putranya yang lain yaitu Pangeran Mangkukusumo?
4. Mengapa pergantian tahta terjadi sementara Sultan HB VII masih hidup dan berkuasa, sebagai sesuatu yang tidak lazim terjadi pada raja-raja Jawa?

Semua jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi kesimpulan penelitian.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki sejumlah tujuan, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengungkap kemampuan Sultan HB VII yang menggunakan strategi tanpa kekerasan dalam menghadapi tekanan pemerintah kolonial yang semakin mengakar. Sultan HB VII dikenal sebagai tokoh yang sangat perhatian terhadap kesenian dan kebudayaan, terutama seni tari dan bentuk pagelaran Wayang Wong. Penelitian akan mengungkapkan, bahwa sikap aktif dalam kesenian dan kebudayaan itu merupakan salah satu cara perlawanan Sultan HB VII, atau justru menunjukkan bahwa “hanya bidang itu saja” yang masih bisa dilakukan sultan secara bebas, akibat keterbatasan ruang gerak sultan pada bidang-bidang yang lain seperti politik, hukum dan ekonomi.
2. Melihat seberapa jauh keterlibatan pemerintah kolonial dalam penetapan seorang pewaris tahta. Penelitian akan mengungkap lebih jauh, bahwa ada motif lain dari pemerintah kolonial setiap kali kursi putra mahkota kosong dan selalu mendesak Sultan HB VII untuk segera mengisi kekosongan kursi putra mahkota itu. Motif pemerintah kolonial selalu berkisar tentang kontrak politik yang harus ditandatangani oleh putra mahkota. Pada masa pemerintahan Sultan HB VII, terjadi pergantian putra mahkota sebanyak empat kali.
3. Melihat polarisasi di kalangan bangsawan di sekeliling raja, terutama antar selir raja dan putra-putranya. Dengan melihat latar belakang, maksud dan tujuan dari para selir untuk membawa putranya menuju posisi putra

mahkota, maka penelitian akan bisa memberi gambaran tentang situasi politik di seputar raja sendiri sendiri. Pola-pola intrik juga akan mencerminkan penanganan yang dilakukan Sultan HB VII untuk menenangkan kembali suasana kraton.

4. Menelusuri motif di balik pengunduran diri Sultan HB VII dari tahta. Tradisi dari masa-masa sebelumnya, kecuali Sultan HB II<sup>16</sup>, tidak pernah ada raja yang diganti ketika masih memerintah. Pergantian dilakukan hanya bila sultan meninggal dunia.

#### **I.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan akademis. Di sini akan dijelaskan kedua manfaat tersebut.

1. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan penjelasan tentang gambaran kekuatan pribadi seorang raja Jawa, khususnya Sultan HB VII di Kesultanan Yogyakarta, dalam menghadapi tekanan kepentingan pemerintah kolonial yang sangat kulminatif pada era akhir abad XIX dan awal abad XX. Gambaran itu sangat tampak pada ujung pemerintahannya yang berakhir dengan pengunduran dirinya sebagai raja. Sultan HB VII adalah sultan di Kesultanan Yogyakarta yang memerintah selama hampir 44 tahun, dan ini merupakan masa terlama bagi pemerintahan seorang raja di Yogyakarta.
2. Manfaat akademisnya adalah bahwa tesis ini diharapkan bisa melengkapi historiografi tentang pemerintahan raja-raja di Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, tesis ini juga diharapkan bisa memberikan gambaran tentang pola intrik-intrik politik di dalam internal kraton, terutama kekuatan-kekuatan para bangsawan di seputar Sultan Hamengku Buwono VII, yang memperebutkan kursi putra mahkota. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya - dalam aspek-aspek lain yang belum banyak diteliti - yang berkaitan dengan Kesultanan Yogyakarta, terutama masa pemerintahan Sultan HB VII dan Sultan HB VIII.

---

<sup>16</sup> Marihandono, Djoko dan Harto Juwono, 2008, "*Sultan Hamengku Buwono II, Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa*," Banjar Aji Production : Yogyakarta.

## **I.5. Batasan Penelitian**

Batasan dari penelitian ini adalah periode tahun 1877 sampai 1921. Pada tahun 1877, terjadi dua peristiwa menarik yang mempengaruhi nasib Kesultanan Yogyakarta selanjutnya. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1877 itu, Pangeran Hangabehi ditetapkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamangkunagoro. Pengangkatan ini penting, karena bersamaan dengan penandatanganan kontrak politik (*veklaring*) oleh putra mahkota, yang disodorkan pemerintah kolonial. Kontrak politik ini menjadi beban bagi putra mahkota ketika nantinya menjadi sultan. Enam hari kemudian, Pangeran Adipati Anom Hamangkunagoro ditetapkan sebagai Sultan HB VII, menggantikan Sultan HB VI, ayahnya, yang telah wafat.

Periode ini merupakan masa pemerintahan Sultan HB VII, yang mana percaturan dunia sedang berubah dengan cepat – yang juga berpengaruh terhadap tatanan masyarakat di Yogyakarta. Selain raja menghadapi campur tangan pemerintah kolonial, Sultan HB VII juga menghadapi ketegangan di sekitar kerabatnya di dalam lingkup keraton. Ketegangan dan intrik politik ini menyangkut posisi putra mahkota yang silih berganti sejak tahun 1883 hingga 1913. Sejak GRM Soedjadi ditetapkan sebagai putra mahkota menggantikan kakaknya, GRM Putro - yang meninggal mendadak - maka situasi kraton sedikit tenang. Namun konspirasi untuk menjatuhkan putra mahkota yang baru tetap saja mengancam, dan hal ini sempat saja menjungkalkan Soedjadi atau Puruboyo dari posisi putra mahkota.

Sementara hubungan Sultan HB VII dan Pemerintah Hindia Belanda juga tak terlalu baik, setidaknya pemerintah kolonial selalu memandang raja Yogya itu bersikap alot dalam menerima reorganisasi agraria dan peradilan yang disodorkan pemerintah kolonial. Tahun 1921, merupakan akhir pembahasan karena pada tahun itu, Sultan HB VII turun tahta dan digantikan oleh putranya, Soedjadi atau Puruboyo, yang menjadi raja dengan gelar Sultan HB VIII. Dengan demikian ketegangan politik itu berakhir dan sejarah Kesultanan Yogyakarta memasuki episode baru.

Wilayah yang menjadi batasan kajian dari penelitian ini adalah Kesultanan Yogyakarta, khususnya di seputar sosok Sultan HB VII. Meskipun lingkup

spasial yang digunakan terbatas, kajian ini akan dipusatkan pada interaksi yang mendasar di lingkup elit kekuasaan Kesultanan Yogyakarta dan kehadiran serta pengaruh para pejabat kolonial Belanda di dalam percaturan politik kraton.

Tema dari penelitian ini adalah ketegangan politik antara penguasa pribumi dan pemerintah kolonial, yang berakhir dengan pergantian tahta. Sepanjang perjalanan kekuasaan raja-raja Kesultanan Yogyakarta, tidak ada raja yang diganti di tengah jalan, dan digantikan dengan raja baru. Pergantian selalu terjadi setelah raja yang memerintah meninggal. Sultan HB VII adalah satu-satunya Sultan Yogyakarta yang turun tahta ketika masih memerintah dan tinggal di kota Yogyakarta tanpa kembali ke tahta. Peristiwa yang menimpa Sultan HB VII hampir serupa dengan kejadian seratus tahun sebelumnya, yang dialami Sultan HB II<sup>17</sup>. Raja yang memerintah pada 1792-1828 ini sempat diturunkan tahta sampai tiga kali dan naik tahta kembali selama tiga pula. Hal yang membedakan, Sultan HB II akhirnya meninggal masih dengan status sebagai raja, sedangkan Sultan HB VII, meskipun masih menyandang gelar sultan, tak lagi punya kekuasaan.

#### **I.6. Sumber yang Digunakan**

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber yang berupa arsip. Arsip-arsip ini tersimpan di pusat-pusat penyimpanan data masa lalu, baik di Jakarta maupun di Yogyakarta. Arsip ini dibagi menjadi dua berdasarkan sumber pembuatannya. Pertama, arsip peninggalan pemerintah kolonial dengan sebagian besar ditulis dalam bahasa Belanda. Arsip kedua adalah arsip yang ditulis dengan huruf Jawa dan berbahasa Jawa, yang merupakan hasil dari administrasi dan korespondensi birokrasi kraton Yogyakarta.

Kelompok arsip pertama yaitu arsip kolonial tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dalam khasanah ANRI, arsip yang digunakan bagi penelitian ini adalah bundel Yogya (*Djocja brieven*). Dalam koleksi ini terdapat laporan umum tahunan (*Algemeen Verslag*) yang dibuat oleh residen Belanda di Yogyakarta dari tahun 1830 sampai tahun 1890. Laporan ini ditulis tiap tahun

---

<sup>17</sup>Marihandono, Djoko dan Harto Juwono, *op. cit.*

kepada Gubernur Jenderal di Batavia dan mencakup berbagai peristiwa yang terjadi selama tahun laporan. Selain laporan umum tahunan ini terdapat juga beberapa berkas surat-menyurat residen Yogyakarta kepada pemerintah pusat di Batavia khususnya mengenai Sultan HB VII.

Laporan wilayah lainnya yang akan digunakan sebagai sumber dalam penulisan ini adalah Memori Serah Terima Jabatan (*Memorie van Overgave*) Residen Yogyakarta. Arsip ini merupakan laporan kerja yang dibuat setiap akhir masa jabatan penulisnya. Isinya mirip dengan laporan tahunan umum, tetapi dirangkum sesuai dengan periode masa jabatan. Memori Serah Terima Jabatan dibuat sejak akhir abad 19 hingga tahun 1940-an. Bentuk laporan ini sudah dalam huruf ketikan dan dikelompokkan dalam beberapa koleksi, yaitu seri 1, 2 dan seri DL dari khsanah ANRI.

Khusus mengenai laporan yang bersifat sangat rahasia (*zeer geheim*), yang biasanya dibuat sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang dianggap beresiko secara politik termasuk kebijakan terhadap raja-raja pribumi, kelompok arsip perlu ditelusuri dalam bundel arsip Departemen Pemerintahan Dalam Negeri (*Department van Binnenlandsch Bestuur*). Koleksi arsip ini merupakan berkas-berkas terpisah yang memuat surat-menyurat hasil administrasi Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (*Directuur van Binnenlandsch Bestuur*), yang membawahi bidang politik dan hubungan dengan raja-raja pribumi. Periode yang dicakup dalam koleksi ini adalah antara tahun 1864-1942, periode ketika departemen tersebut difungsikan sebagai suatu institusi pemerintah kolonial.

Berkas-berkas lainnya tersimpan dalam koleksi Sekretariat Negara (*Algemeen Secretarie*) yang merupakan kumpulan arsip hasil korespondensi di kantor Sekretaris Umum. Institusi ini menjadi saluran keluar dan masuk ke Gubernur Jenderal di Batavia dan diberi wewenang untuk menyimpan berkas-berkas arsip Gubernur Jenderal. Dalam koleksi ini, yang berjangkauan periodisasinya antara 1816-1941, yakni berkas-berkas yang menyangkut kebijakan terhadap raja-raja Jawa, kontrak-kontrak politik dan pergantian tahta, tersimpan di sini.

Untuk data lain yang berkaitan dengan pemerintah kolonial, sumber leksikografi (sumber resmi yang diterbitkan) juga digunakan. Terutama

disebutkan di sini adalah *Koloniaal Verslag* (Laporan Kolonial). Data ini tersimpan di dua tempat yaitu di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta dan di Perpustakaan Sono Budoyo, Yogyakarta. Sumber ini merupakan laporan pertanggungjawaban Menteri Koloni sebagai wakil Ratu Belanda dalam sidang umum tahunan Parlemen Belanda (*Staten Generaal*) yang mencakup berbagai bidang dalam administrasi pemerintahan di tanah-tanah koloni. Tentang hubungan dengan raja-raja pribumi khususnya di Jawa, dimuat pada bagian C (*Hoofdstuk C*) yang mencakup politik dalam negeri koloni. Periode yang akan digunakan dalam menelusuri data ini adalah sejak pelantikan Sultan Hamengku Buwono VII pada tahun 1877 sampai penurunannya pada tahun 1921.

Sementara itu juga arsip leksikografi lainnya adalah *Rijksblad van Kesultanan Yogyakarta*. Arsip ini memuat kumpulan keputusan yang dijadikan sebagai undang-undang kerajaan (*Rijksblad*) di Kesultanan Yogyakarta. Data ini dibuat dalam dua bahasa yaitu bahasa dan huruf Jawa di sisi kiri, dan berbahasa Belanda di sisi kanan. Dalam sumber ini, berbagai peraturan yang berlaku di Kesultanan Yogyakarta dibuat dan diterapkan. Hal yang penting untuk diambil di sini adalah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengangkatan putra mahkota, penetapan birokrasi kraton dan keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan pemerintahan di kraton Yogyakarta.

Dari arsip-arsip Jawa setidaknya ada dua macam yang digunakan bagi sumber informasi dari penelitian ini. Hal yang pertama adalah karya-karya sastra. Karya sastra terpenting berbahasa Jawa di sini adalah *Serat Sapta Asta*. Karya ini memuat kisah tentang proses pergantian tahta antara Sultan Hamengku Buwono VII kepada Sultan Hamengku Buwono VIII. *Serat Sapta Asta* disusun atas perintah Sultan Hamengku Buwono IX atas dasar pertimbangan ada kebutuhan untuk memberikan penjelasan tentang proses pergantian tahta itu kepada kerabat kraton. Karya ini ditulis dalam bahasa dan aksara Jawa dan tersimpan dalam koleksi karya Jawa di Perpustakaan Sono Budoyo Yogyakarta. Sumber ini sangat penting, karena memberikan penjelasan yang gamblang tentang kondisi saat Sultan HB VII menempati Pesanggrahan Ambarukmo, dan hubungannya dengan putranya, Sultan HB VIII.

Sumber data Jawa lainnya adalah kumpulan surat-surat yang dihasilkan oleh administrasi *Kepatihan Dalem* di bawah pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII. Surat-surat ini masih tersimpan di *Dalem Kadipaten*, kompleks Kraton Yogyakarta. Dalam berkas-berkas yang berhuruf dan berbahasa Jawa ini, digunakan sumber informasi tentang kebijakan Sultan Hamengku Buwono VII dalam tata pemerintahannya. Khususnya di sini akan ditelusuri informasi langsung dari sosok raja ini atau dari orang-orang di sekitarnya sehubungan dengan masalah pencalonan putra mahkota dan pergantian tahta. Arsip-arsip ini sangat penting setidaknya sebagai pembanding informasi yang diperoleh dari berkas-berkas arsip kolonial dan juga bisa memberikan informasi pelengkap bagi informasi yang tidak ditemukan dalam arsip-arsip kolonial.

Di samping sumber-sumber arsip, penelitian ini juga akan menggunakan data-data yang diperoleh dari penerbitan sezaman. Data yang dimaksudkan di sini adalah data yang ditemukan dari koleksi surat kabar terbitan masa lalu. Prioritas akan diberikan pada penelusuran surat kabar yang diterbitkan di Yogyakarta dan sekitarnya pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII. Seperti halnya arsip, surat kabar ini juga diterbitkan dalam dua bahasa, dan kadang-kadang juga dua huruf.

Surat kabar berbahasa Belanda yang terkenal di wilayah Yogyakarta pada masa itu adalah *Nieuw Vorstenlanden* terbitan Surakarta. Surat kabar ini memiliki latar belakang pandangan ideologis yang berorientasi pada konservatisme. *Nieuw Vorstenlanden* memuat sejumlah ulasan tentang kebijakan dan peristiwa politik yang menyangkut Kesultanan Yogyakarta dari sudut pandang dan analisis yang cukup kritis. Hal ini memberikan informasi atau asumsi bagi penelitian, khususnya sebagai opini publik pada saat itu dari kalangan masyarakat Eropa atau setidaknya dari kalangan intelektual.

Surat kabar berbahasa Belanda yang lain yang juga diterbitkan pada masa itu adalah *Mataram*. Surat kabar terbitan Yogyakarta pada awal abad XX ini cukup mendominasi penyebaran informasi media massa saat itu di wilayah raja-raja Jawa. Surat kabar ini berbau kapitalis, karena didirikan oleh para penyewa tanah. Berita dan ulasannya banyak menempatkan pandangan-pandangan maju dari dunia Barat. *Mataram* dalam hal ini sangat penting, karena beritanya sangat



lengkap tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Vorstenlanden dan kegiatan para pejabat Kesultanan Yogyakarta.

Terbitan sezaman lainnya berupa majalah sezaman. Majalah yang dimaksudkan di sini adalah kumpulan tulisan ilmiah, laporan atau hasil analisa dari para ilmuwan, pengamat dan bekas pejabat. Para penulisnya bisa berada di luar konteks tulisannya, atau menjadi saksi langsung dari peristiwa yang dituliskannya. Pada umumnya majalah-majalah ini dimuat dalam bahasa Belanda, mengingat konsumsi tulisan ini pada masa itu terdiri atas intelektual yang menguasai bahasa Belanda. Di antara majalah-majalah ini adalah *Indische Gids*, yang diterbitkan sejak tahun 1879. Majalah *Indische Gids* memuat artikel-artikel tentang hubungan pemerintah Hindia Belanda dan raja-raja pribumi termasuk Jawa. Pada edisi tahun 1892, majalah ini juga memuat kontrak-kontrak politik yang dibuat oleh pemerintah Belanda dan Sultan Hamengku Buwono VII dan Sunan Paku Buwono IX. Kontrak ini diambil dari arsip yang tersimpan dalam bundel *Department van Binnenlandsch Bestuur* pada khasanah arsip kolonial.

Majalah lain yang digunakan adalah *Tijdschrift van Bataviasch Genootschap* (TBG) yang merupakan majalah dengan artikel-artikel dari bidang antropologis-budaya. Seperti halnya *Indische Gids*, TBG juga ditulis oleh para ilmuwan dan bekas pejabat kolonial yang membuat tulisan mengenai kondisi sosial budaya di wilayah kerja atau wilayah penelitiannya. Dalam majalah ini, banyak tulisan yang dimuat oleh sejumlah penulis kolonial yang menyangkut masalah budaya Jawa, termasuk juga raja-raja Jawa.

Selain majalah-majalah yang diterbitkan oleh para penerbit Eropa, majalah yang diterbitkan oleh institusi pribumi juga akan digunakan. Di antara majalah ini adalah *Djawa*, yang diterbitkan oleh Mangkunegaran sejak tahun 1921. Meskipun majalah ini terbit pada akhir masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII, beberapa tulisan yang dimuat dalam majalah ini memberikan informasi dan pandangan tentang kondisi politik di Kesultanan Yogyakarta selama dekade 1920-an termasuk awal masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII. Majalah-majalah ini bisa ditemukan dalam koleksi Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Sumber-sumber informasi lain akan digali dari sumber-sumber sekunder. Sumber dimaksudkan di sini adalah buku-buku yang telah ditulis dengan menggunakan metode penulisan sejarah ilmiah oleh para ilmuwan baik asing maupun pribumi. Meskipun perlu melalui proses kritik, informasi yang dimuat dalam buku ini bisa digunakan sebagai masukan atau dasar titik tolak untuk mengamati peristiwa yang menjadi tema penelitiannya. Informasi itu juga bisa digunakan untuk mengetahui pandangan dan sudut pandang penulis sebelumnya terkait dengan tema penelitian ini, dan bisa dilakukan proses verifikasi terhadap opini mereka.

### **I.7. Metodologi Penelitian**

Pada penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah metodologi strukturis. Hal ini untuk menyesuaikan dengan fokus utama penelitian, yaitu interaksi antar individu di seputar pusat kekuasaan. Peran individu sangat besar dan penting dalam memunculkan peristiwa sejarah. Oleh karena itu metodologi yang digunakan di sini adalah metodologi sejarah yang memberikan fokus utama pada motivasi dan interaksi individu sebagai agen dalam struktur yang ada, yaitu strukturis.<sup>18</sup>

Penggunaan metodologi strukturis dianggap sesuai mengingat dalam pendekatan ini, peran dan posisi individu sebagai agen perubahan akan diangkat ke permukaan. Individu tidak harus selalu ditentukan oleh struktur yang ada, tetapi bisa memiliki motivasi dan kemampuan (*power*) untuk memisahkan diri dari struktur. Pemisahan diri dari struktur ini diperlukan untuk menentukan tindakannya dan membuktikan kemampuannya dalam menghadapi struktur yang ada dengan tujuan mengubahnya. Setelah pemisahan diri ini, individu akan menganggap struktur yang selama ini telah mapan dan dominan sebagai hambatan bagi perubahan. Ironisnya, struktur tersebut memberikan peluang bagi individu

---

<sup>18</sup>Christopher Lloyd, *The Structures of History* (Oxford, 1992, Blackwell), halaman 44-48.

untuk memisahkan diri. Dengan *power* yang dimiliki, individu atau agen akan mampu mengatasi hambatan. Semakin kecil hambatan yang ada, semakin besar *power* yang dimilikinya, semakin mudah perubahan struktur terjadi.<sup>19</sup>

Dalam penulisan laporan akhir ini, Sultan Hamengku Buwono VII menjadi agen utama dalam mencoba menciptakan perubahan dalam struktur pemerintahan kesultanan yang dicengkeram oleh kekuatan kolonial yang mendominasi kehidupan sosial politik Yogyakarta pada saat itu. Sementara itu juga peran para tokoh lain di kalangan elit kraton saat itu seperti Patih Danurejo VI, putra mahkota dan residen-residen Belanda lebih ditekankan sebagai peran pribadi daripada sebagai pemegang jabatan. Di sini inisiatif dan motivasi pribadi individu cukup berperan dalam mendorong terjadi interaksi dan menciptakan suatu dampak sebagai hasil dari interaksi ini (reproduksi).

### **I.8. Pendekatan Konseptual**

Tema penelitian ini adalah sejarah politik, dengan fokus pada perubahan kekuasaan yang ditandai dengan akhir pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII dan awal pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII di Yogyakarta. Konteks yang diambil dalam penelitian ini adalah sebuah institusi pemerintahan tradisional Jawa yang terwujud dalam Kesultanan Yogyakarta. Sebagai suatu institusi pemerintahan yang bertumpu pada tradisi kekuasaan Jawa, Kesultanan Yogyakarta memiliki perangkat aturan dan adat yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan termasuk oleh raja.

Salah satu ketentuan yang bersumber pada aturan tradisi adalah masalah pengangkatan sebagai seorang raja dan pergantiannya oleh raja yang lain. Di Kesultanan Yogyakarta, sejak masa pembentukannya oleh Pangeran Mangkubumi pada tahun 1755, prinsip yang digunakan adalah raja bergelar Sultan. Mangkubumi memilih gelar ini bukan hanya atas dasar pertimbangan agar berbeda dengan Kesunanan Surakarta, tetapi lebih ditekankan pada kekuasaan seorang sultan.<sup>20</sup> Sultan dalam konteks pemerintahan suatu negara Islam merupakan pimpinan pemerintahan dan pimpinan agama. Dengan demikian

---

<sup>19</sup>Anthony Giddens, *The Constitution of Society* (Cambridge, 1984, Polity Press), halaman 31.

<sup>20</sup>C. Poensen, "Mangkubumi", dalam *BKI*, tahun 1901, jilid LII, halaman 259.

Sultan bukan hanya merupakan seorang penguasa duniawi tetapi juga sebagai pemimpin spiritual. Hal ini terlihat dari gelar setiap Sultan di Yogyakarta yaitu *Ngabdur Rachman Sayidin Panatagama Kalifatullah ing tanah Jawa* (pemimpin umat, wakil Tuhan di dunia untuk berkuasa di tanah Jawa).<sup>21</sup>

Sebelum memasuki bidang tersebut, dalam hal ini perlu dipertegas dan diperjelas terlebih dahulu apa yang dimaksudkan sebagai Sultan.

Sultan adalah gelar bagi seseorang yang memiliki kekuasaan tinggi dalam sebuah negara (pemerintahan) Islam. Dalam al-Quran kata “sultan” disebut sebanyak 34 kali dengan pengertian yang bermacam-macam, antara lain: kekuasaan, berkuasa, bukti, hujah (tanda, bukti, alasan), mukjizat, keterangan, alasan, ilmu pengetahuan dan kekuatan.<sup>22</sup>

Pengertian Sultan menurut definisi di atas menunjukkan adanya keterkaitan dengan semua yang dianggap mulia, agung dan besar. Sifat-sifat Sultan tersebut masih abstrak, tetapi diungkapkan dalam bentuk fisik yaitu sosok seseorang pemimpin yang memiliki legalitas dan kewenangan (kekuasaan) untuk memerintah orang lain. Dari sini, Sultan bukan hanya sebagai pemimpin biasa. Jika seorang pemimpin biasa memiliki kemampuan membuat orang-orang mematuhi perintahnya, Sultan lebih dari itu yaitu tanpa memerintah, sosoknya telah menciptakan kesan terhadap orang lain untuk patuh kepadanya (kharisma).

Sultan berarti kekuasaan. Gelar, yang menunjukkan kekuasaan de facto, namun pada akhirnya menjadi raja yang mandiri. Posisi kesultanan disahkan sebagai “kesultanan yang saleh”, di mana sultan harus melaksanakan semua fungsi khalifah yang sebelumnya tidak bisa dilaksanakannya.<sup>23</sup>

Konsep di atas lebih tegas menunjukkan bahwa istilah Sultan berkaitan erat dengan kekuasaan atau pemerintahan. Hal ini tidak bisa dibantah karena pandangan tentang Sultan dikaitkan dengan kepatuhan terhadap perintah Allah, yang salah satu caranya adalah dengan pengamalan hidup saleh. Seseorang yang telah dikenal sebagai seorang yang hidupnya saleh, sudah selayaknya dianugerahi dengan kekuasaan untuk memimpin kawula atau umat. Hal ini berarti bahwa

---

<sup>21</sup>J. Brandes, “Yogyakarta”, dalam *TBG*, tahun 1888, halaman 410.

<sup>22</sup>*Ensiklopedi Islam* (Jakarta, 2005, Intermedia), halaman 250-251.

<sup>23</sup>Ahmad Abdul Aziz, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta, 2006, Prestasi Pustakakarya), halaman 338-339.

Sultan sebagai pemegang kekuasaan, secara *de facto* harus menerapkan kekuasaan itu dalam pemerintahannya sebagai seorang penguasa yang saleh. Dengan demikian, dia dianggap sebagai tipe penguasa yang ideal.

Ketika konsep di atas diterapkan untuk menjelaskan posisi raja-raja Jawa, khususnya Sultan di kerajaan Islam Jawa, definisi di atas tidak jauh berbeda. Dalam pandangan Jawa tentang kekuasaan dan pemegang kekuasaan tertinggi, konsep Sultan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh periode sebelum kedatangan Islam. Di zaman Hindu, raja-raja Jawa dianggap sebagai inkarnasi dewa sehingga mereka dipuja dalam kultus dewa-raja. Pengkultusan ini tidak bisa dilepaskan dari pandangan mikrokosmos dan makrokosmos, yang mana raja merupakan perwujudan dewa dalam alam mikro.<sup>24</sup> Hal ini terungkap juga dalam bentuk struktur kekuasaan dan pemerintahan wilayahnya. Pandangan mikrokosmos diterapkan dalam topologi kewilayahan Jawa, di mana raja selalu berada pada sentral kekuasaan dengan kedudukan di *kuthogoro* (ibukota negara). Ia dikelilingi oleh para bangsawan yang menguasai *negara agung* dan para pejabat daerah taklukannya di *monconegoro*. Di luar lingkaran ketiga ini, yang berarti semakin jauh dari sentral kekuasaan, nilai-nilai pancaran wahyu sang raja menjadi semakin redup. Di bawah kekuasaan raja-raja Islam tersebut, tipe ideal pengaruh Hindu ini masih tetap ada. Hal ini tampak dari syair berikut :

<i>Ratune ratu utama</i>	Rajanya ada adalah raja yang utama
<i>Patihe patih linuwih</i>	Patihnya adalah orang terpilih
<i>Pranayaka tyas raharja</i>	Para pejabatnya selalu sejahtera
<i>Panekare becik-becik</i>	Perbuatannya selalu baik
<i>Parandene tan dadi</i>	Meskipun demikian tetap tidak mencegah
<i>Paliasing kala bendu</i> <sup>25</sup>	kemarahan Dewa Kala

Syair tersebut menunjukkan adanya tipe ideal seorang raja yang seharusnya untuk memerintah suatu negara. Jika rajanya memiliki kekuasaan yang besar dan

---

<sup>24</sup>Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX* (Jakarta, 1985, Yayasan Obor Indonesia), halaman 34.

<sup>25</sup>Fachry Ali, *Refleksi Paham "Kekuasaan Jawa" dalam Indonesia Modern* (Jakarta, 1986, Gramedia), halaman 41. Syair itu diambil dari *Serat Kalatida* karya R. Ng. Ranggawarsita.

memerintah menurut kesalehan, maka sudah bisa dipastikan bahwa negaranya akan makmur dan rakyatnya hidup dengan sejahtera.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, di masa pemerintahan raja-raja Islam, Sultan mencerminkan perpaduan keduanya : kekuasaan dan kesalehan. Sebagai seorang Sultan, ia bukan hanya menampilkan sosok penguasa besar dan mutlak tetapi juga menjadi *panutan* bagi kawulanya sebagai seorang yang saleh, yaitu *Kalifatullah* (wakil Tuhan di dunia). Karena statusnya yang demikian, ia tidak memerintah berdasarkan hukum. Hukum yang digunakan adalah instruksi yang keluar darinya sebagai wakil dari sabda Tuhan. Dengan demikian jika seorang raja tidak mematuhi janji atau ucapannya, ia sendiri dianggap melanggar perintah Tuhan. Di sini muncul apa yang disebut *Sabda Pandita Ratu, sabda pandita tan kena wola-wali, sabda ratu rata tiyang saknagari* (sabda pandita dan raja, sabda seorang pandita tidak boleh berubah-ubah, sabda ratu berlaku bagi manusia seluruh negeri). Apa yang dikatakan oleh raja bukan hanya berlaku bagi seluruh kawula di negerinya tetapi juga bagi dirinya sendiri.

Konsep di atas ini kemudian akan diterapkan untuk melihat apakah Sultan Hamengku Buwono VII menepati jati dirinya sebagai seorang raja atau Sultan Jawa, khususnya berkenaan dengan pemilihan dan pengangkatan putra mahkota yang menciptakan ketegangan politik baik di kalangan elit Kesultanan Yogyakarta maupun antara Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah Hindia Belanda.

### **I.9. Penelitian Sebelumnya.**

Penelitian atau karya sejarah yang menyangkut masa lalu Kesultanan Yogyakarta telah ditulis oleh beberapa orang, baik sejarawan maupun bukan. Di bawah ini akan disampaikan sejumlah hasil karya penelitian yang menyangkut periode yang digunakan dalam penelitian ini dan tema penelitian yang difokuskan pada sosok seorang raja.

Karya pertama yang disebutkan di sini adalah Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta, 1830-1939*.<sup>27</sup> Karya ini merupakan hasil

---

<sup>26</sup>Moedjanto, "Konsep Kepemimpinan dan Kekuasaan Jawa Tempo Dulu", dalam Hans Antlöv dan Sven Cederroth, *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter* (Jakarta, 2001, Yayasan Obor), halaman xvii. Moedjanto menyebut luasnya kekuasaan raja Jawa ini dengan istilah *gung binathara, bahu dhendha nyakrawati, ageng negarinipun, wiyar jajahanipun* (mirip dewa, mengendalikan seluruh dunia, besar negaranya, luas daerah takluknya).

dari disertasi yang diterbitkan dan mengisahkan tentang kondisi intern kraton Kesunanan Surakarta periode setelah berakhirnya Perang Diponegoro sampai wafatnya Sunan Paku Buwono X. Dalam karya ini, diungkapkan bagaimana kondisi kehidupan di balik tembok Kraton Surakarta seiring dengan semakin berkurang kekuasaan dan wilayah para Sunan yang memerintah. Penulisnya berusaha menggambarkan bagaimana perbedaan kebijakan dari Sunan Paku Buwono VII hingga Sunan Paku Buwono X terhadap kawulanya, terutama para *abdi dalem* dan *sentono dalem* di bawah tekanan kekuatan kolonial yang semakin keras dan meluas. Bukan hanya struktur birokrasi, kebijakan raja terhadap birokrasinya dan persoalan politik lainnya, tetapi juga karya ini mencakup tradisi budaya yang diwujudkan dalam berbagai bentuk tatacara dan upacara-upacara kraton yang difungsikan untuk menopang legalitas dan mempertahankan kebesaran kekuasaan raja.

Karya ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung penulisan tesis ini terutama karena dalam karya ini juga digambarkan bagaimana hubungan Sunan dengan kerabat terdekatnya, termasuk para istri, selir dan putra-putranya. Hal ini sangat penting karena meskipun mengisahkan tentang Kesunanan Surakarta, hubungan tersebut bisa mencerminkan bagaimana proses yang dialami oleh seorang raja Jawa dalam menentukan calon pewaris tahta. Perlu diketahui di sini bahwa pergantian tahta raja-raja Surakarta juga tidak selalu berjalan sesuai dengan tipe ideal yaitu putra mahkota menggantikan ayahnya. Sunan Paku Buwono VII sendiri adalah mertua dari raja yang digantikannya, sementara Sunan Paku Buwono IX adalah putra Sunan Paku Buwono VI. Ini membuktikan betapa rumit dan riskannya masalah pergantian tahta di suatu kerajaan Jawa sebagai institusi politik.

Namun demikian, karya ini juga tidak memberikan gambaran yang jelas tentang motivasi yang mendasari masing-masing agen dalam peranan mereka menciptakan perubahan. Pendekatan struktural yang digunakan dalam karya ini mengakibatkan ada polarisasi yang jelas antara kekuatan luar struktur - dalam hal ini penguasa kolonial Belanda, dan kekuatan di dalam struktur yaitu Kesunanan

---

<sup>27</sup>Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939* (Yogyakarta, 2000, Yayasan Untuk Indonesia).

Surakarta. Padahal masing-masing raja memiliki motivasi dan reaksi yang berbeda-beda terhadap interaksi dengan kekuatan luar, termasuk juga masing-masing residen Belanda yang bertugas di Surakarta yang juga memiliki strategi bertindak yang berbeda-beda.

Karya kedua adalah dari Soedarsono, *Wayang Wong: The State Ritual Dance Drama in the Court of Yogyakarta*.<sup>28</sup> Seperti halnya di atas, ini juga merupakan hasil disertasi yang diterbitkan. Karya ini lebih banyak mengupas tentang salah satu bentuk kesenian kraton yaitu wayang orang, yang mengalami suatu proses perubahan atas dasar pergeseran spasial, yaitu dari dalam menuju luar kraton. Peristiwa ini terjadi di bawah pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII lewat para putranya yang mendirikan kursus menari gaya kraton Yogyakarta, Krida Beksa Wirama pada tahun 1918. Bersamaan dengan itu juga terjadi perkembangan pesat dalam kehidupan seni lainnya yang terkait di kraton Yogyakarta, seperti karawitan, wayang kulit, bahkan hingga busana para abdi dalem dan kerabat raja.

Walaupun lebih banyak difokuskan pada bidang kesenian, karya ini bisa digunakan sebagai sumber informasi dan deskripsi bagi tesis ini. Kenyataan membuktikan bahwa Sultan Hamengku Buwono VII selama masa pemerintahannya mencurahkan perhatian yang besar pada bidang kesenian. Hal ini semakin jelas menjelang akhir masa kekuasaannya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah motivasi yang mendorong Sultan bertindak demikian didasarkan pada latar belakangnya sebagai seorang pecinta seni, ataukah ada maksud lain di mana kesenian dijadikan sebagai wahana untuk menyalurkan tekanan hatinya di bidang politik. Keraguan ini diperkuat dengan kondisi serupa yang terjadi di Surakarta, yaitu semangat memperbaharui kehidupan seni budaya oleh Sunan Paku Buwono X pada akhir tahun 1910-an.<sup>29</sup>

Apabila karya ini akan digunakan sebagai salah satu rujukan, hasil penelitian tersebut harus dianalisis secara cermat. Tema utama karya itu adalah bentuk karya seni kraton yang tumbuh dan berkembang dalam proses perubahan.

---

<sup>28</sup>Soedarsono, *Wayang Wong: The State Ritual Dance Drama in the Court of Yogyakarta* (Yogyakarta, 1984, Gadjah Mada Univ. Press).

<sup>29</sup>George Larson, *Menjelang Revolusi : Surakarta 1911-1942* (Yogyakarta, 1986, Gadjah Mada Univ. Press).



Hal ini seolah-olah mengalami perkembangan yang terpisah dari kehidupan politik di kraton saat itu. Keterkaitan antara pertumbuhan seni dan percaturan politik yang melibatkan para bangsawan, sekaligus juga sebagai pemegang peran utama dalam kehidupan seni kraton, tidak ditunjukkan secara tegas oleh penulisnya. Hal ini mengakibatkan pertanyaan yang dilontarkan di atas tidak bisa menemukan jawaban yang memadai.

Karya ketiga yang telah dilakukan sebagai hasil penelitian adalah M.C. Ricklef, *Yogyakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1792*.<sup>30</sup> Ini merupakan disertasi Ricklef sekaligus merupakan karya pertama yang diterbitkan sebagai suatu buku sejarah ilmiah mengenai kerajaan Jawa. Dalam karya ini Ricklef bukan hanya menjelaskan bagaimana Mangkubumi tampil sebagai seorang sosok penting dari elit Mataram menjelang keruntuhan kerajaan ini dan perjuangannya sehingga menjadi seorang raja Jawa. Ricklef juga menjelaskan persoalan apa yang dihadapi oleh Mangkubumi sejak sebelum menjadi raja hingga bertahta, setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755, dan masih dihadapi olehnya hingga wafatnya. Persoalan tersebut bahkan akan terus dihadapi oleh raja-raja penggantinya, yaitu persoalan penunjukan pewaris tahta dan hubungannya dengan pemerintah kolonial.

Gambaran Ricklef tersebut bisa digunakan sebagai referensi untuk memahami bagaimana konteks politik yang terbentuk di Kesultanan Yogyakarta pada akhir abad XIX merupakan dampak dari fondasi yang telah diletakkan oleh interaksi politik antara raja-raja Yogyakarta sebelumnya dan pemerintah kolonial Belanda. Ricklef telah memberikan gambaran sejak awal tentang adanya hubungan ketegangan yang terselubung antara Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah Belanda atau dengan Kesunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Hal itu akan terus berkelanjutan hingga menjelang akhir kekuasaan rezim kolonial di Hindia Belanda.

Dalam menyusun karya itu, Ricklef menggunakan banyak sumber termasuk sumber-sumber dari administrasi VOC maupun karya-karya naskah Jawa. Salah satu kelemahan yang dilakukan oleh Ricklef adalah tidak

---

<sup>30</sup>M.C. Ricklef, *Yogyakarta Under Sultan Mangkubumi, 1749-1792* (Singapore, 1974, Oxford Univ. Press).

memberikan deskripsi bagaimana Yogyakarta setelah Mangkubumi wafat, sementara ia menggunakan data-data terutama dari karya sastra Jawa yang dibuat setelah pemerintahan raja pertama Yogyakarta itu. Hal ini mengakibatkan ada keterputusan rangkaian peristiwa yang diawali oleh Mangkubumi dengan raja-raja berikutnya, setidaknya sampai masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono V, yang mana masalah pewarisan tahta memicu terjadi Perang Diponegoro.

#### **I.10. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk rekonstruksi sebagai suatu karya sejarah. Karya ini akan terdiri atas beberapa bab yang dirangkum sebagai berikut.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang akan mencakup latar belakang dan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, sumber dan metodologi yang digunakan, pendekatan konseptual, penelitian yang telah dilakukan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua mencakup hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah kolonial Belanda selama masa pemerintahan Sultan HB VII, 1877-1920. Dalam bab ini akan diuraikan tuntutan pemerintah kolonial terhadap Sultan HB VII khususnya bagi pengambil alihan hak-hak raja oleh pemerintah kolonial melalui program reorganisasi yang dilaksanakan di Kesultanan Yogyakarta, termasuk reorganisasi peradilan dan agraria. Keduanya dilaksanakan atas dasar dari hubungan formal yang diwujudkan melalui kontrak-kontrak politik baru, yang wajib ditandatangani oleh Sultan HB VII. Dalam bab ini juga diuraikan sekilas tentang era kemunculan kesadaran nasional

Bab ketiga menjelaskan tentang proses pergantian tahta antara tahun 1881-1913. Periode ini dimulai dengan adanya latar belakang polarisasi yang belum berakhir sejak masa pemerintahan raja sebelumnya, dilanjutkan dengan pengangkatan sejumlah pangeran menjadi putra mahkota. Semua putra mahkota yang diangkat selama periode ini di Kesultanan Yogyakarta tidak berhasil melanjutkan statusnya sebagai raja, dan berakhir dengan kematian atau pengasingan.

Bab keempat mengungkapkan tentang pengangkatan putra mahkota terakhir di Kesultanan Yogyakarta, Pangeran Puruboyo. Setelah menduduki status putra mahkota, Puruboyo masih harus menghadapi tantangan yang bermaksud menyingkirkannya dari status tersebut dan upayanya untuk mempertahankan statusnya serta memperkuat posisinya. Puruboyo juga harus mencoba mempersiapkan diri dalam menghadapi tuntutan pemerintah kolonial yang bermaksud melakukan perombakan di Kesultanan Yogyakarta.

Bab kelima menguraikan tentang bulan-bulan terakhir kekuasaan Sultan HB VII, penurunan tahtanya dan pergantiannya dengan Puruboyo sebagai Sultan HB VIII. Dalam bagian ini juga akan dijelaskan konteks apa yang mendorong penurunan tahta Sultan HB VII dan hubungan yang terjalin antara raja ini dan Puruboyo, yang kemudian menjadi Sultan HB VIII. Hal ini bisa menjelaskan persoalan yang ada di antara kedua raja tersebut dan mengungkapkan fakta yang selama ini tidak diketahui terutama di kalangan kerabat kedua raja Yogya ini.

Bab ke enam adalah penutup, sebagai kesimpulan dari penelitian ini.



Foto Sultan Hamengku Buwono VII mengenakan pakaian kebesaran militer (KNIL) dengan pangkat Jendral Mayor.

Sumber :

<http://www.google.co.id/imglanding?q=hb%20vii&imgurl:http://i218.photo.bucket.com/albums/CC252/swarabumi/HBVII2.jpg>.